



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH YANG MENGATUR KELEMBAGAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap Kajian Akademik pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan rekomendasi pembentukan terhadap beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh;
- c. bahwa terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tidak mendapatkan rekomendasi pembentukan, perlu mencabut Peraturan Gubernur Aceh yang Mengatur Kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Aceh yang Mengatur Kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang ...

9/4

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR ACEH YANG MENGATUR KELEMBAGAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 18);
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Aceh pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 79);

3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 6);
4. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 22);
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 49);
6. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 30);
7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 17);
8. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Investasi dan Promosi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 35 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 29);
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 18);
11. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 15);

12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 45);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 46);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

- (1) Seluruh aset dan dokumen pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Badan:
  - a. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
  - b. UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru Wilayah I sampai dengan Wilayah IX;
  - c. UPTD Pusat Layanan Autis Aceh;
  - d. UPTD Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - e. UPTD Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja;
  - f. UPTD Balai Peningkatan Sumber Daya Transmigran;
  - g. UPTD Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. UPTB Laboratorium Keamanan Pangan;
  - i. UPTB Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
  - j. UPTB Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
  - k. UPTD Seuramo Informasi Aceh;
  - l. UPTD Telematika;
  - m. UPTB Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
  - n. UPTB Pelayanan Perpustakaan Dan Jasa Kearsipan;
  - o. UPTD Metrologi;
  - p. UPTD Perbenihan Budidaya Perikanan Air Tawar;
  - q. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i; dan
  - r. UPTB Islamic Center.

dilakukan pencatatan dan inventarisasi oleh Kepala Dinas/Kepala Badan terkait sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepada Dinas atau Kepala Badan terkait.

## Pasal 3

Hak-hak keuangan untuk pejabat struktural (eselonering) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan pemberhentian pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi tanggung jawab Kepala Dinas atau Kepala Badan terkait.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Mei 2018 M

17 Sya'ban 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Mei 2018 M  
18 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

DERMAWAN